



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2025

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE

2025



LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpin.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate adalah entitas akuntansi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Stasiun KIPM Ternate mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Diharapkan laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada kantor Stasiun KIPM Ternate. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ternate, 19 Januari 2026

Kepala,



W. S. St. Pi., M.P.

NIP. 198105202003121005

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Laporan Operasional	5
III. Laporan Perubahan Ekuitas	6
IV. Neraca	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
F. Pengungkapan Penting Lainnya	47
Lampiran dan Daftar	

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Ternate Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Laporan keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA. 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 34.725.000,00 atau mencapai 173,63 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 20.000.000,00.

Realisasi Belanja Negara TA. 2025 adalah sebesar Rp. 2.409.606.445,00 atau 92,68 persen dari alokasi anggaran Rp. 2.599.983.000 dan Selama Tahun 2025 pada Stasiun KIPM Ternate telah melakukan Revisi DIPA sebanyak 12 kali antara lain sebagai berikut:

Keterangan	Anggaran	Revisi Tingkat	Tanggal Revisi	Perihal
DIPA Awal	2,684,228,000		29 November 2024	
Revisi Ke 01	2,684,228,000	Kanwil DJPB	23 Januari 2025	Penyesuaian Gaji Tenaga Non ASN
Revisi Ke 02	2,684,228,000	DJA	21 Februari 2025	Revisi Kebijakan Inpres No. 01 2025
Revisi Ke 03	2,684,228,000	Kanwil DJPB	03 Maret 2025	Penyesuaian Hal. III DIPA
Revisi Ke 04	2,684,228,000	DJA	16 April 2025	Revisi Buka Blokir Kegiatan Operasional
Revisi Ke 05	2,684,228,000	Kanwil DJPB	23 April 2025	Penyesuaian Hal. III DIPA
Revisi Ke 06	2,684,228,000	Kanwil DJPB	16 Juli 2025	Penyesuaian Gaji Tenaga Non ASN dan Penyesuaian Anggaran Pengujian Monitoring Cemar Perairan
Revisi ke 07	2,757,336,000	Kanwil DJPB	08 Oktober 2025	Pergeseran Pagu Tenaga Non ASN
Revisi ke 08	2,757,336,000	Kanwil DJPB	18 Oktober 2025	Penyesuaian Hal. III DIPA da Pemutakhiran F
Revisi ke 09	2,599,983,000	DJA	18 November 2025	Revisi Buka Blokir Kegiatan Dukman
Revisi ke 10	2,599,983,000	Kanwil DJPB	05 Desember 2025	Pemutakhiran POK
Revisi ke 11	2,599,983,000	Kanwil DJPB	10 Desember 2025	Pemutakhiran POK
Revisi ke 12	2,599,983,000	Kanwil DJPB	12 Desember 2025	Pemutakhiran POK

2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 34.725.000,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 2.626.964.851,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (2.592.239.851,00). Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. (2.879.060,00) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (2.595.118.911,00).

3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 3.001.828.550,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (2.595.118.911,00) ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 2.395.699.594,00 maka Penurunan Ekuitas sebesar Rp. (148.900.531,00) sehingga Ekuitas akhir tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 2.852.928.019,00.

4. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2025. Jumlah Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 2.861.420.957,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 4.555.314,00, Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 2.861.420.957,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 2.861.420.957,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

STASIUN KIPM TERNATE LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-25		% thd Angg	31-Dec-24
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	20,000,000	34,725,000	173.63	25,330,000
JUMLAH PENDAPATAN		20,000,000	34,725,000	173.63	25,330,000
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	1,078,025,000	1,076,102,073	99.82	1,021,653,812
Belanja Barang	B.4	1,521,958,000	1,333,504,372	87.62	1,850,396,691
Belanja Modal	B.5	0	0	0	0
JUMLAH BELANJA		2,599,983,000	2,409,606,445	92.68	2,872,050,503

II. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN KIPM TERNATE LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-25	31-Dec-24
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
- Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	34,725,000	24,970,000
JUMLAH PENDAPATAN		34,725,000	24,970,000
BEBAN			
- Beban Pegawai	D.2	1,076,069,163	1,021,653,812
- Beban Persediaan	D.3	133,934,705	219,809,858
- Beban Barang dan Jasa	D.4	997,633,528	1,148,428,457
- Beban Pemeliharaan	D.5	193,895,745	165,282,313
- Beban Perjalanan Dinas	D.6	101,689,681	436,355,454
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	123,741,865	311,414,899
- Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	164	-
JUMLAH BEBAN		2,626,964,851	3,302,944,793
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2,592,239,851)	(3,277,974,793)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
- Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	(2,879,060)	(8,921,250)
JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(2,879,060)	(8,921,250)
SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2,595,118,911)	(3,286,896,043)
POS LUAR BIASA	D.10		
- Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(2,595,118,911)	(3,286,896,043)

III. NERACA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-25	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR			
Piutang Bukan Pajak	C.1	32,910	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.2	(164)	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.3	32,746	60,903,650
Persediaan	C.4	4,522,568	
Jumlah Aset Lancar		4,555,314	60,903,650
ASET TETAP			
Tanah	C.5	1,098,077,000	1,098,077,000
Peralatan dan Mesin	C.6	4,811,747,217	4,594,015,717
Gedung dan Bangunan	C.7	2,009,312,500	1,966,238,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.8	38,748,000	38,748,000
Aset Tetap Lainnya	C.9	-	-
Akumulasi Penyusutan	C.10	(5,101,019,074)	(4,744,871,995)
Jumlah Aset Tetap		2,856,865,643	2,952,206,722
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.11	-	-
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	C.12	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		2,861,420,957	3,013,110,372
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.13	8,492,938	11,281,822
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.14	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.15	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.16	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	C.17	8,492,938	11,281,822
JUMLAH KEWAJIBAN		8,492,938	11,281,822
EKUITAS			
Ekuitas	C.18	2,852,928,019	3,001,828,550
JUMLAH EKUITAS		2,852,928,019	3,001,828,550
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2,861,420,957	3,013,110,372

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STASIUN KIPM TERNATE LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-25	31-Dec-24
EKUITAS AWAL	E.1	3,001,828,550	7,039,024,983
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2,595,118,911)	(3,286,896,043)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	50,518,786	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.3	22,118,000	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.5	28,400,786	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.6	-	-
JUMLAH		50,518,786	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	2,395,699,594	(750,300,390)
KENAIKAN/PENURUNAN EKIUTAS		(148,900,531)	(4,037,196,433)
EKUITAS AKHIR	E.6	2,852,928,019	3,001,828,550

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ternate, 19 Januari 2026



Arsal, S.St.Pi., M.P.

NIP. 198105202003121005

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun KIPM Ternate

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Stasiun KIPM Ternate adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis dan mempunyai tugas dan fungsi sebagai lembaga pengendalian serta pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Stasiun KIPM Ternate berkedudukan di Kompleks Bandara Sultan Baabullah Ternate.

Visi : Terwujudnya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, berkelanjutan, dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Misi : 1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik disetiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Stasiun KIPM Ternate pada Tahun Anggaran 2025 memiliki sumber daya manusia sebanyak 5 orang PNS, 8 orang PPPK, 3 orang pegawai Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP)

dan 3 Orang pegawai *outsourcing*.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Stasiun KIPM Ternate. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Stasiun KIPM Ternate menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Stasiun KIPM Ternate dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Stasiun KIPM Ternate. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam

penyusunan Laporan Keuangan Stasiun KIPM Ternate adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen

sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Realisasi
Pendapatan Rp.
34.725.000,00*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 34.725.000,00 atau telah mencapai 173.63 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000. Pendapatan Kantor Stasiun KIPM Ternate terdiri dari Pendapatan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Berupa Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	20,000,000	34,725,000	173.63
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Jumlah	20,000,000	34,725,000	173.63

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2025 telah mencapai target anggaran tahun 2025 dibanding TA 2024. Hal ini disebabkan oleh pagu anggaran yang ditetapkan tahun 2025 sebesar Rp. 20.000.000,00 lebih rendah dibanding pagu anggaran yang ditetapkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 39.050.000,00. Secara jumlah realisasi PNBP pada TA 2025 juga mengalami kenaikan sebesar 37,09 persen dibandingkan jumlah realisasi

PNBP TA 2024. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 banyak unit pengolahan ikan yang melakukan pengujian laboratorium di SKIPM ternate sehingga pendapatan pengujian mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI Tahun Anggaran 2025	REALISASI Tahun Anggaran 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	0.00
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	34,725,000	25,330,000	37.09
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	-	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	0.00
Jumlah	34,725,000	25,330,000	37.09

*Realisasi Belanja
Negara Rp.
2.409.606.445,00*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja SKIPM Ternate pada TA 2025 adalah sebesar Rp. 2.409.606.495,00 atau 92.68 persen dari anggaran belanja sebesar Rp. 2.599.983.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

Uraian	31-Dec-25		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	1,078,025,000	1,076,102,073	99.82
Belanja Barang	1,521,958,000	1,333,504,372	87.62
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	2,599,983,000	2,409,606,445	92.68

Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami sedikit penurunan sebesar 16,10% dibandingkan realisasi belanja pada sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat sehingga beberapa pagu

anggaran diblokir.

*Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025
Dan TA 2024*

URAIAN	REALISASI Tahun Anggaran 2025	REALISASI Tahun Anggaran 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1,076,102,073	1,021,653,812	5.33
Belanja Barang	1,333,504,372	1,850,396,691	(27.93)
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	2,409,606,445	2,872,050,503	(16.10)

*Belanja Pegawai
Rp.
1.076.102.073,00*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada SKIPM Ternate TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.076.102.073,00 dan Rp. 1.021.653.812,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan 5,33% dari TA 2024 karena adanya kenaikan jumlah pegawai di Stasiun KIPM Ternate menjadi 5 (lima) PNS dan 8 (delapan) PPPK.

*Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025
Dan TA 2024*

URAIAN	REALISASI Tahun Anggaran 2025	REALISASI Tahun Anggaran 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS dan PPPK	338,005,720	353,022,600	(4.25)
Belanja Pembulatan Gaji PNS dan P3K	5,823	5,276	10.37
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS dan P3K	24,393,940	30,285,770	(19.45)
Belanja Tunj.Anak PNS dan P3K	7,830,174	10,101,934	(22.49)
Belanja Tunj. Struktural PNS	7,560,000	7,560,000	-
Belanja Tunj.Fungsional PNS	9,300,000	18,040,000	(48.45)
Belanja Tunj.Beras PNS dan P3K	21,581,160	25,709,100	(16.06)
Belanja Uang Makan PNS dan P3K	59,047,000	47,020,000	25.58
Belanja Tunj. Umum PNS dan P3K	10,190,000	5,420,000	88.01
Belanja Tunj.Khusus/Kegiatan PNS dan P3K	504,668,591	459,481,102	9.83
Belanja Tunj. PPh PNS	1,423,665	1,535,152	
Belanja Uang Lembur	92,096,000	63,473,000	45.09
Jumlah Belanja Kotor	1,076,102,073	1,021,653,812	5.33
Pengembalian Belanja Pegawai		-	-
Jumlah Belanja	1,076,102,073	1,021,653,812	5.33

*Belanja Barang
Rp.
1.333.504.372,00*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada SKIPM Ternate TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.333.504.372,00 dan Rp. 1.850.396.691,00. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan 27,93 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2024. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran di beberapa kegiatan untuk mendukung program pemerintah.

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI Tahun Anggaran 2025	REALISASI Tahun Anggaran 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	685,129,279	922,497,823	(25.73)
Belanja Jasa	315,293,133	231,111,181	36.42
Belanja Pemeliharaan	178,583,645	144,248,328	23.80
Belanja Perjalanan	101,689,681	436,355,454	(76.70)
Belanja Persediaan	52,808,634	116,183,905	(54.55)
Jumlah Belanja Kotor	1,333,504,372	1,850,396,691	(27.93)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	1,333,504,372	1,850,396,691	(27.93)

*Belanja Modal
Rp. 0*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya

yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal TA 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan dengan TA 2024, dikarenakan tidak ada realisasi belanja modal di Stasiun KIPM Ternate.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI Tahun Anggaran 2025	REALISASI Tahun Anggaran 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0

Belanja Modal Tanah Rp. 0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah pada SKIPM Ternate TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Realisasi Belanja Modal Tanah TA. 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan dengan TA 2024, dikarenakan tidak ada realisasi belanja tersebut di Stasiun KIPM Ternate.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 0

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada SKIPM Ternate TA 2025 adalah sebesar Rp. 0 dan pada TA 2024 sebesar Rp. 0. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan dengan TA 2024, dikarenakan tidak ada realisasi belanja tersebut di Stasiun KIPM Ternate. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA
2025 dan TA 2024*

URAIAN	REALISASI Tahun Anggaran 2025	REALISASI Tahun Anggaran 2024	NAIK (TURUN) %
Meja Kerja Kayu	-	-	0.00
Kursi Kayu	-	-	0.00
AC Split	-	-	0.00
PC Unit	-	-	0.00
Laptop	-	-	0.00
Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	-	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0.00

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp. 0*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada SKIPM Ternate TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 tidak mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan TA 2024, karena tidak ada realisasi belanja tersebut di Stasiun KIPM Ternate.

*Belanja Modal
Perencanaan dan
Pengawasan
Gedung dan
Bangunan Rp. 0*

B.5.4 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal pada SKIPM Ternate TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan TA 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan dengan TA 2024, dikarenakan tidak ada realisasi belanja tersebut di Stasiun KIPM Ternate.

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi,
dan jaringan Rp.
0*

B.5.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada SKIPM Ternate TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan TA 2024, dikarenakan tidak ada realisasi belanja

tersebut di Stasiun KIPM Ternate.

*Belanja Modal
Lainnya Rp. 0*

B.5.6 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada SKIPM Ternate TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan dengan TA 2024, dikarenakan tidak ada realisasi belanja tersebut di Stasiun KIPM Ternate.

*Belanja Bantuan
Sosial Rp. 0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada SKIPM Ternate TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak terdapat belanja bantuan sosial pada TA 2025 di Stasiun KIPM Ternate.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	31-Dec-25	31 Desember 2024
UP / TUP	-	-
Uang di Bank	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp.0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp. 0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada dibawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang Bukan
Pajak Rp.
32.910,00*

C.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 32.910,00. dan Rp. 0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan

pembayarannya. Piutang Bukan Pajak pada Stasiun KIPM Ternate pada periode per 31 Desember 2025 merupakan pengembalian tunjangan kinerja bulan Desember Tahun 2024 untuk satu pegawai PPPK.

*Piutang PNB
Rp.0*

C.5 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0. dan Rp. 0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang/jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp.0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Lancar
Rp.(164,00)*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. (164,00) dan Rp. 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja Dibayar
di Muka Rp.0*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, Belanja dibayar di muka merupakan hak

yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp.0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Persediaan Rp. 4.522.568,00

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.522.568,00 dan Rp. 60.903.650,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	31-Dec-25	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	4,470,068	24,084,000
Bahan untuk Pemeliharaan	52,500	1,688,527
Bahan Baku	-	34,460,527
Jumlah	4,522,568	60,903,650

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR Rp.0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih – Piutang
Jangka Panjang
Rp.0*

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tanah
Rp.
1098.077.000,00*

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Stasiun KIPM Ternate per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.098.077.000 dan Rp. 1.098.077.000. Tidak terdapat penambahan ataupun pengurangan pada Aset Tetap berupa Tanah per TA 2025. Aset tetap Tanah terdapat di Ternate selaku kantor induk.

*Peralatan dan
Mesin
Rp.
4.811.747.217,00*

C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 4.811.747.217,00 dan Rp. 4.594.015.717,00. Terdapat penambahan aset berubah hibah mobil sebesar Rp. 268.470.000,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	4,811,747,217
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	268,470,000
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	4,811,747,217
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(4,663,413,462)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	148,333,755

Gedung dan
Bangunan
Rp.
2.009.312.500,00

C.15 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 2.009.312.500,00 dan Rp. 1.966.238.000,00.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	2,009,312,500
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2025	2,009,312,500
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(419,438,326)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1,589,874,174

Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp.
38.748.000,00

C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 38.748.000,00 dan Rp. 38.748.000,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	38,748,000
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi Kurang	-
-	
Saldo per 31 Desember 2025	38,748,000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(18,167,286)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	20,580,714

Aset Tetap
Lainnya
Rp.0

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Aset tetap lainnya disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025	0
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
- Penghapusan	0
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp. 0

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada SKIPM Ternate per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp.
(5.101.019.074)

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. (5.101.019.074) dan Rp. (4.744.871.995). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember TA 2025*

No	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan
1	Peralatan dan Mesin	4,663,413,462
2	Gedung dan Bangunan	419,438,326
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18,167,286
Akumulasi Penyusutan		5,101,019,074

*Aset Tak
Berwujud Rp. 0*

C.20 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Lain-Lain
Rp. 0*

C.21 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp. 0.*

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari
KPPN Rp. 0

C.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp. 8.492.938,00

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 8.492.938,00 dan Rp. 11.281.822,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Utang Yang
Belum Ditagihkan
Rp. 0

C.25 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Adapun Utang Yang Belum Ditagihkan berasal dari kuitansi UP yang belum di-SPJ kan bendahara Pengeluaran ke KPPN Ternate.

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp.0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp.0

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Ekuitas
Rp.
2.852.928.019,00

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.852.928.019,00 dan Rp. 3.001.828.550,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp.
34.725.000,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 34.725.000 dan Rp. 24.970.000. Pada TA 2025, terdapat kenaikan sebesar 39,07 persen dibanding TA 2024. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 banyak unit pengolahan ikan yang melakukan pengujian laboratorium di SKIPM ternate sehingga pendapatan pengujian mengalami kenaikan. Adapun Pendapatan Negara Bukan Pajak terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember
TA 2025 dan 31 Desember TA 2024*

URAIAN	Semester II 2025	Semester II 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	34,725,000	24,970,000	39
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-		
Jumlah	34,725,000	24,970,000	39.07

Beban Pegawai Rp.
1.076.069.163,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Stasiun KIPM Ternate per 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.076.069.163,00 dan Rp. 1.021.653.812,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Adapun pada TA 2025 ada kenaikan beban pegawai sebesar 5,33% dibandingkan dengan TA 2024 karena adanya perubahan status pegawai dan perubahan ke jabatan fungsional tertentu.

Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS dan P3K	338,005,720	353,022,600	(4.25)
Beban Pembulatan Gaji PNS dan P3K	5,823	5,154	12.98
Beban Tunj. Suami/Istri PNS dan P3K	24,393,940	30,285,770	(19.45)
Beban Tunj. Anak PNS dan P3K	7,830,174	10,101,934	(22.49)
Beban Tunj. Struktural PNS	7,560,000	7,560,000	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	9,300,000	18,040,000	(48.45)
Beban Tunj. Beras PNS dan P3K	21,581,160	25,709,100	(16.06)
Beban Uang Makan PNS dan P3K	59,047,000	47,020,000	25.58
Beban Tunjangan Umum PNS dan P3K	10,190,000	5,420,000	88.01
Beban Uang Lembur PNS dan P3K	92,096,000	63,473,000	-
Beban Tunj. PPh PNS	1,423,665	1,535,152	
Beban Pegawai(Tunjangan Khusus/Kegiatan)	504,635,681	459,481,102	9.83
Jumlah	1,076,069,163	1,021,653,812	5.33

Beban Persediaan Rp.
133.934.705,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada SKIPM Ternate per 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 133.934.705,00 dan Rp. 219.809.858,00. Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Adapun pada Tahun 2025 terjadi penurunan beban persediaan sebesar 39,07% dibandingkan Tahun 2024.

Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	Semester II TA 2025	Semester II TA 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	66,438,691	180,631,531	(63.22)
Beban Persediaan Bahan Baku	67,496,014	39,178,327	72.28
Jumlah	133,934,705	219,809,858	(39.07)

Beban Barang dan Jasa
Rp. 997.633.528,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Stasiun KIPM Ternate per 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 997.633.528,00 dan Rp. 1.148.428.457,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Pada Tahun 2025 terjadi penurunan sebesar 13,13 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025
dan TA 2024*

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	489,705,506	732,185,041	(33.12)
Beban Panambah Daya Tahan Tubuh	8,778,500	34,845,000	(74.81)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,500,000	3,974,020	(37.09)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	62,640,000	44,804,000	39.81
Beban Barang Operasional Lainnya	53,947,423	55,662,605	(3.08)
Beban Bahan	67,554,850	44,353,000	52.31
Beban Honor Output Kegiatan	0	3,264,000	(100.00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0.00
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	0.00
Beban Langganan Listrik	71,261,678	118,808,647	(40.02)
Beban Langganan Telepon	4,020,551	3,576,844	12.40
Beban Langganan Air	6,561,000	9,845,500	(33.36)
Beban Jasa Profesi	0	0	0.00
Beban Jasa Lainnya	230,664,020	97,109,800	0.00
Beban Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0.00
Jumlah	997,633,528	1,148,428,457	(13.13)

Beban Pemeliharaan Rp.
193.895.745,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada SKIPM Ternate per 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 193.895.745,00 dan Rp. 165.282.313,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2025 terjadi kenaikan sebesar 17,31% dibandingkan dengan Tahun 2024. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2025 dan TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan TA 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	59,309,835	11,997,000	0.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	119,273,810	132,251,328	(9.81)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	15,312,100	21,033,985	(27.20)
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0.00
Jumlah	193,895,745	165,282,313	17.31

Beban Perjalanan Dinas
Rp. 101.689.681,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada SKIPM Ternate per 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 101,689,681,00 dan Rp. 436,355,454,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	77,914,681	399,557,571	-80.50
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	23,775,000	36,797,883	-35.39
Jumlah	101,689,681	436,355,454	-76.70

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp. 0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada SKIPM Ternate per 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban Bantuan Sosial Rp.
0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Di Kantor Stasiun KIPM Ternate tidak terdapat Beban bantuan sosial. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban Penyusutan dan
Amortisasi Rp.
123.741.865,00*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024 pada Stasiun KIPM Ternate adalah masing-masing sebesar Rp. 123.741.865,00 dan Rp. 311.414.899,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat

disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2025 dan TA 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	96,674,806	237,727,500	(59.33)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26,354,445	71,090,273	(62.93)
Beban Penyusutan Irigasi	357,760	1,332,895	(73)
Beban Penyusutan Jaringan	354,854	1,264,231	(71.93)
JUMAH PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	123,741,865	311,414,899	(60)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp.164,00

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada SKIPM Ternate untuk periode 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 164,00 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2025 dan TA 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	164	0	0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0.00
Jumlah	164	0	0.00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional
Rp.(2.879.060,00)

D.12 Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada Stasiun KIPM Ternate per 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. (2.879.060,00) dan Rp. (8.921.250,00) Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	NAIK (TURUN) %
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
- Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	360,000	0.00
- Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	9,281,250	0.00
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	(8,921,250)	0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
- Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0.00
- Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,879,060	0	0.00
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(2,879,060)	0	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(2,879,060)	(8,921,250)	0.00

Pos Luar Biasa Rp. 0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa pada Stasiun KIPM Ternate untuk periode 31 Desember Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp. 0 dan Rp. 0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp.
3.001.828.550*

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.001.828.550 dan Rp. 7.039.024.983

*Defisit LO
Rp. (2,595,118,911,00)*

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. (2,595,118,911,00) dan Rp. (3,286,896,043,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp. 0*

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan
Rp. 0*

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode per 31 Desember tahun 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

*Koreksi Atas Reklasifikasi
Rp. 22.118.000,00*

E.3.3. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah

masing-masing sebesar Rp. 22.118.000,00 dan Rp. 0.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp. 0

E.3.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Koreksi Aset Non Revaluasi Rp. 28.400.786,00

E.3.5 Koreksi Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 28.400.786,00 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-Lain Rp. 0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas Rp. 2.395.699.594,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.395.699.594,00 dan Rp. (750.300.390,00). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian transaksi antar entitas TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(34,725,000)
Ditagikan ke Entitas Lain	2,409,606,445
Transfer Masuk	21,110,089
Transfer Keluar	(291,940)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	2,395,699,594

DDEL Rp.
34.725.000,00/DKEL Rp.
(2.409.606.445,00)

E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp. 34.725.000,00 sedangkan DKEL sebesar Rp. (2.409.606.445,00).

Transfer Masuk/Transfer
Keluar Rp.
21.110.089,00/Rp.
291.940,00

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk/Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 21.110.089/Rp. 291.940.

Rincian Transfer Keluar

TGL DOK	TGL BUKU	KODE BARANG	NAMA BARANG	TOTAL
07/08/2025	07/08/2025	101030101400001	Sertifikat SMKHP Kode B	Rp 291.940,00
Total				Rp 291.940,00

Rincian Transfer Masuk

TGL DOK	TGL BUKU	KODE BARANG	NAMA BARANG	TOTAL
2/20/2025	2/28/2025	101030101400001	Sertifikat SMKHP Kode A	Rp 36.350
2/20/2025	2/28/2025	101030101400001	Sertifikat SMHKP Kode D	Rp 72.700
2/20/2025	2/28/2025	101030101400001	Sertifikat SMKHP Kode G	Rp 36.350
2/18/2025	2/18/2025	101010200100016	Plate Count Agar Merk	Rp 2.910.000
2/18/2025	2/18/2025	101010200100017	Lauryl Sulfate Broth	Rp 1.910.000
2/18/2025	2/18/2025	101010200100016	Hektogen Enteric Agar	Rp 5.482.000
2/18/2025	2/18/2025	101010200100017	Buffered Peptone Water	Rp 1.523.000
2/18/2025	2/18/2025	101010200100016	Levine's Eosin Methylen Blue	Rp 1.461.514
2/18/2025	2/18/2025	101010299900021	Formaldehid Test Kit M	Rp 5.490.000
6/26/2025	6/26/2025	101030101400001	Sertifikat SMKHP KODE B	Rp 364.925
06/11/2025	06/11/2025	101030101400001	Sertifikat SMHKP Kode D	Rp 363.550
07/28/2025	07/28/2025	101030101400001	Sertifikat SMKHP (Format H)	Rp 366,300.00
08/11/2025	08/11/2025	101030101400001	Sertifikat SMKHP Kode A	Rp 363,550.00
11/10/2025	11/10/2025	101030101400001	Sertifikat SMKHP (Format H)	Rp 366,300.00
11/27/2025	11/27/2025	101030101400001	Sertifikat SMHKP Kode D	Rp 363,550.00
Total				Rp 21.110.089,00

Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung Rp. 0

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0. Sedangkan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp.0.

Ekuitas Akhir Rp. 2.852.928.019,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31

Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.852.928.019,00 dan Rp. 3.001.828.550,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pada tanggal pelaporan/penyusunan laporan Keuangan TA 2025 terjadi:

- Adanya 12 (Enam) kali Revisi DIPA dengan melakukan penyesuaian Halaman III DIPA, setelah direvisi menjadi Rp. 2.599.983.000,00.
- Adanya transaksi masuk berupa kendaraan dinas roda empat dengan Nomor : B.1320/BPPMHKP.1/PL.450/III/2025. Transaksi masuk senilai Rp. 268.470.000.
- Adanya pengangkatan PPPK sebanyak 7 orang di lingkup SKIPM Ternate.
- Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dengan Kode 01 dari 9 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP, dengan Rincian Pagu Rp. 350.000.000,00 dan Realisasi Pagu Pasca Blokir Rp. 165.754.920,00 atau 99,99% dan terdapat kegiatan yang tidak terlaksanakan, dikarenakan anggaran terkena blokir *automatic adjustment* (AA) sebesar Rp. 184.228.000,00. dengan rincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Uraian	PAGU	Anggaran Terblokir	Sisa Anggaran Pasca Blokir	REALISASI	Prosentase (%) Pagu Tidak Terblokir
1	3989.PDC.002	Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi lingkup produk pada UP	Rp. 90.000.000	Rp. 55.906.000	Rp. 34.094.000	Rp. 34.094.000	100%
2	3989.PDF.002	Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	Rp. 100.000.000	Rp. 83.322.000	Rp. 16.678.000	Rp. 16.678.000	100%
4	3989.QIC.002	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 0	Rp. 0	0%
5	7010.ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 0	Rp. 0	0%
6	7010.DCC.001	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 0	Rp. 0	0%
7	7010.PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	Rp. 80.000.000	Rp. 0	Rp. 80.000.000	Rp. 79.983.100	99,98 %
8	7010.PDD.001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	Rp. 25.000.000	Rp. 0	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	100%
9	7010.PDD.002	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium	Rp. 10.000.000	Rp. 0	Rp. 10.000.000	Rp. 9.999.820	100%
10	7010.QIA.001	Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 0	Rp. 0	0%
	Jumlah		Rp. 350.000.000	Rp. 184.228.000	Rp. 165.772.000	Rp. 165.754.920	99,99%